

LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

**Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 Tahun 2014**



PERIODE

1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Disahkan di Fakfak
Pada Hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023

Sekretaris,



Yurice J.C. Rembet, S.T.
NIP. 19870712 201101 2 022

Ketua Tim Survey,



Ganjar Prima Anggara, S.H.
NIP.19920727 201712 1 007

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,



Dony Hardiyanto, S.H.,M.Hum.
NIP. 19770331 200212 1 004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Fakfak mengadakan Survey ini. Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Fakfak, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan Survey dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Fakfak dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Fakfak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Fakfak, 5 Oktober 2023

Tim Survey

DAFTAR TABEL

<i>No.Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas	7
2.	Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi	8
3.	Nilai Persepsi	8
4.	Responden Menurut Karakteristik Tingkat Pendidikan Terakhir	9
5.	Responden Menurut Karakteristik Jenis Pekerjaan	10
6.	Responden Menurut Karakteristik Umur	10
7.	Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin	11
8.	Jenis Layanan yang dipergunakan Responden	11
9.	Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
10.	Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	14
11.	Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	15
12.	Indeks pada Indikator Transparansi Biaya	16
13.	Indeks pada Indikator Biaya Tambahan	17
14.	Indeks pada Indikator Hadiah	18
15.	Indeks pada Indikator Tranparansi Pembayaran	19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PEGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6 6
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan Pelaksana	
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	
3.1. Profil Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	23 24
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	27
4.2. Rekomendasi	28
LAMPIRAN – LAMPIRAN	29

16. Indeks pada Indikator Percaloan	20
17. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang	21
18. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia	22
19. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak	23
20. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak	24
21. Masukan dan Pandangan Responden	25
22. Rata-Rata Skor Ruang Lingkup Indeks Persepsi Anti Korupsi	27

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Jenis Layanan yang dipergunakan Responden	12
2. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	13
3. Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	14
4. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	15
5. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya	16
6. Indeks pada Indikator Biaya Tambahan	17
7. Indeks pada Indikator Hadiah	18
8. Indeks pada Indikator Tranparansi Pembayaran	19
9. Indeks pada Indikator Percaloan	20
10. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang	21
11. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia	22
12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilakukan sendiri, Survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara Pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan.
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari kuesioner / pengantar.
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan waktu pengumpulan data.
- Penyusunan Jadwal.
Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survey

dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data.

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka – angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar didapat data – data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan

Negeri Fakfak.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar – benar diSurvey secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data Persepsi Anti Korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks

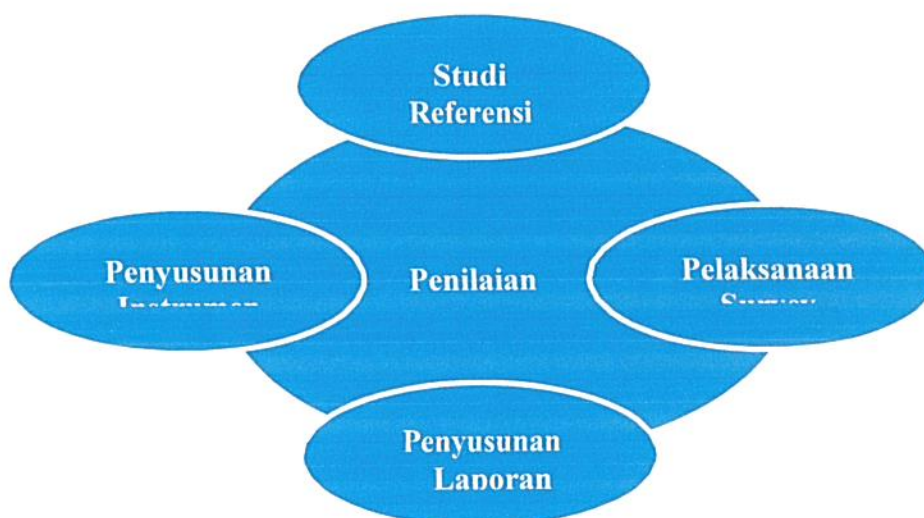
Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Pertama, menentukan bobot total dari masing – masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata – rata setiap indikator.
- b) Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 – 100.
- c) Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1- 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Persepsi Anti Korupsi makin baik semakin Bersih dari Korupsi.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum Tim melakukan Survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1
Model alur penyusunan Survey IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi

No.	Ruang lingkup
1.	Manipulasi Peraturan
2.	Penyalahgunaan Jabatan
3.	Menjual Pengaruh
4.	Transparasi Biaya
5.	Biaya Tambahan
6.	Hadiah
7.	Transparasi Pembayaran
8.	Percaloan
9.	Perbuatan Curang
10.	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil Survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan SMU sebesar **27orang (50.00%)**.

Tabel 4
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	% (Persen)
1	SD	3	5.56
2	SMP	2	3.70
3	SMU	27	50.00
4	Diploma 1	2	3.70
5	Diploma 2	0	0.00
6	Diploma 3	1	1.85
7	S1	17	31.48
8	S2	1	1.85
9	S3	0	0.00
10	Tidak/Belum Sekolah	1	1.85
Total		54	100,00

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **61.11%** atau 33 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan memiliki pekerjaan lainnya dari pilihan yang ada.

Tabel 5
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	% (Persen)
1	PNS	10	18.52
2	TNI	0	0.00
3	POLRI	0	0.00
4	SWASTA	7	12.96
5	WIRUSAHA	1	1.85
6	TENAGA KONTRAK	3	5.56
7	LAINNYA	33	61.11
Total		54	100,00

3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada usia antara 40 tahun s/d 49 tahun (37,04%).

Tabel 6
Usia Responden

No.	Usia	Jumlah (Orang)	% (Persen)
1	18 – 28 Tahun	15	27.78
2	29 – 39 Tahun	13	24.07
3	40 – 49 Tahun	20	37.04
4	50 – 59 Tahun	5	9.26
5	60 – 69 Tahun	1	1.85
Total		54	100,00

3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan kelompok jenis kelamin responden, menunjukkan bahwa

mayoritas pengguna layanan adalah Laki-laki yaitu sebanyak 39 responden (**72,22%**).

Tabel 7
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	% (Persen)
1	Laki-Laki	39	72.22
2	Perempuan	15	27.78
Total		54	100,00

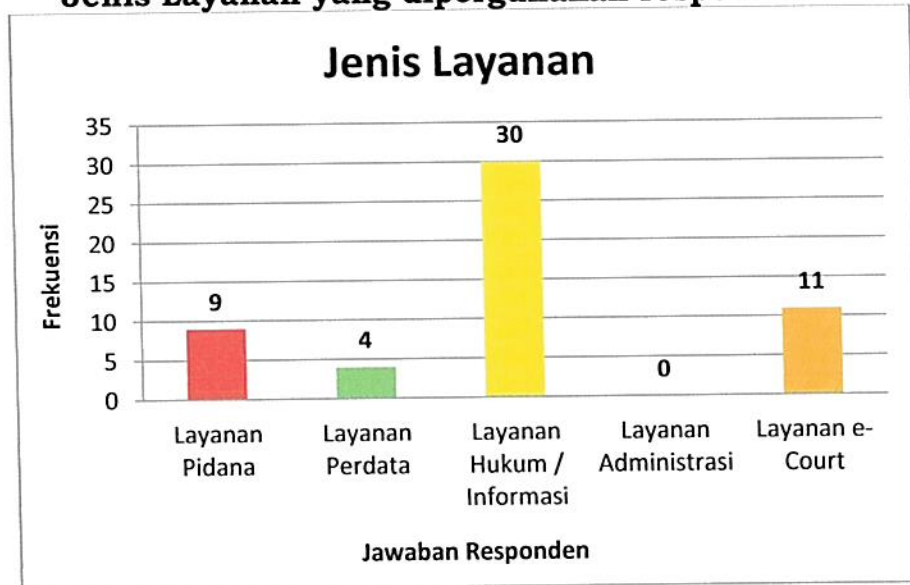
3.1.5. Layanan Yang Digunakan

Dari sisi jenis layanan yang digunakan, menunjukkan bahwa sebesar **55,56%** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan menggunakan layanan pada meja hukum/informasi.

Tabel 8
Jenis Layanan yang dipergunakan responden

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	% (Persen)
1	Layanan Pidana	9	16.67
2	Layanan Perdata	4	7.41
3	Layanan Hukum / Informasi	30	55.56
4	Layanan e-Court	0	0.00
Total		54	100,00

Gambar 1
Jenis Layanan yang dipergunakan responden



3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 – 4, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,944**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari tindakan manipulasi peraturan.

Tabel 9
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0.00
2	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0.00
3	Sering Sesuai Prosedur	3	3	5.56

4	Selalu Sesuai Prosedur	4	51	94.44
Total			54	100,00

Gambar 2
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan



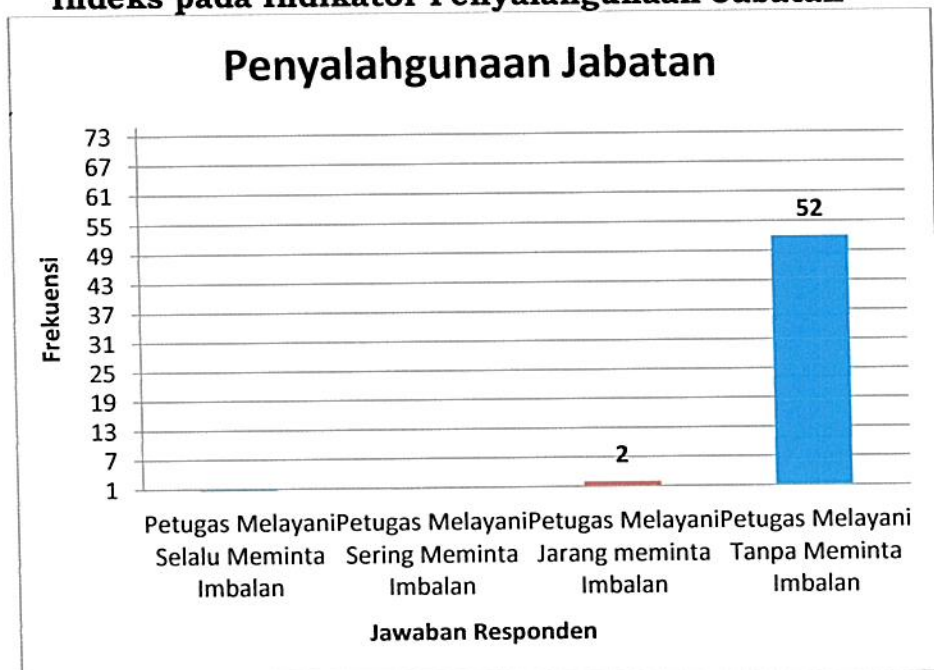
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 – 4 hasil persepsi responden pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan pada hasil Indeks **3,963**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 10
Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0	0.00
2	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0	0.00
3	Petugas Melayani Jarang meminta Imbalan	3	2	3.70
4	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	52	96.30
Total			54	100,00

Gambar 3
Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan



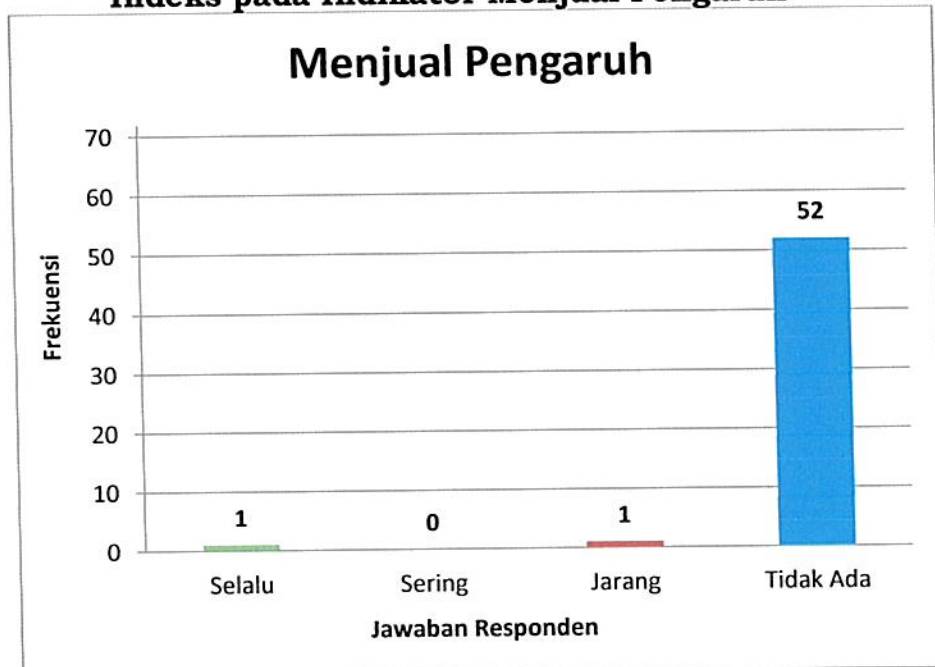
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 – 4 hasil persepsi responden pada Indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada Indeks **3,926**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari tindakan menjual pengaruh.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Selalu	1	1	1.85
2	Sering	2	0	0.00
3	Jarang	3	1	1.85
4	Tidak Ada	4	52	96.30
Total			54	100,00

Gambar 4
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 – 4 hasil persepsi responden pada Indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada Indeks **3,648**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dalam transparansi biaya.

Tabel 12
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Tidak Pernah	1	2	3.70
2	Jarang	2	1	1.85
3	Sering	3	11	20.37
4	Selalu	4	40	74.07
Total			54	100,00

Gambar 5
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 – 4 hasil persepsi responden pada Indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada **3,500**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari biaya tambahan.

Tabel 13
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Tidak Pernah	1	6	11.11
2	Jarang	2	2	3.70
3	Sering	3	5	9.26
4	Selalu	4	41	75.93
Total			54	100,00

Gambar 6
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan



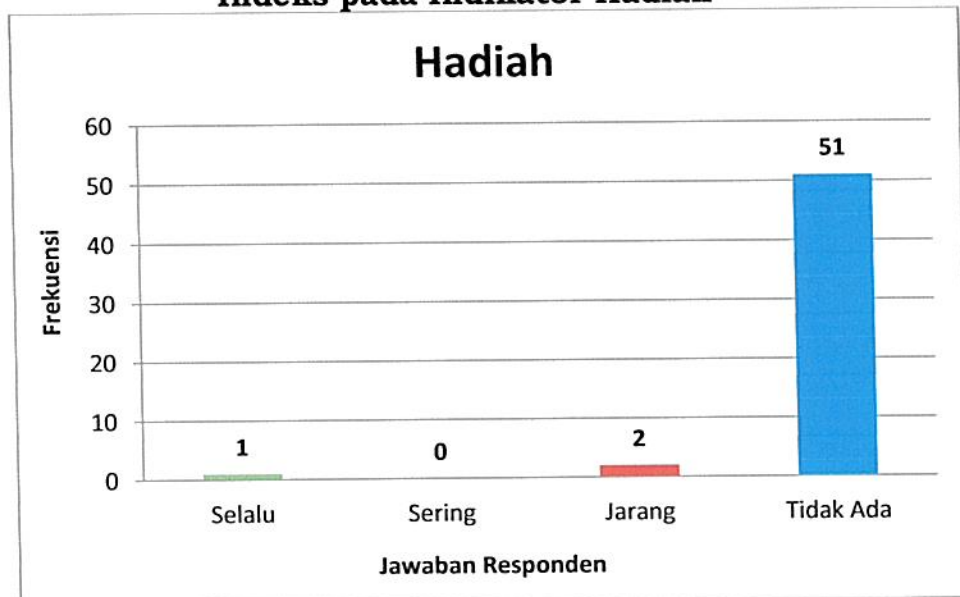
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 – 4 hasil persepsi responden pada Indikator Hadiah menunjukkan hasil pada Indeks **3,907**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari indikator hadiah.

Tabel 14
Indeks pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Selalu	1	1	1.85
2	Sering	2	0	0.00
3	Jarang	3	2	3.70
4	Tidak Ada	4	51	94.44
Total			54	100,00

Gambar 7
Indeks pada Indikator Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 – 4 hasil persepsi responden pada Indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada Indeks **3,796**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari transparansi pembayaran.

Tabel 15
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Tidak Pernah	1	3	5.56
2	Jarang	2	0	0.00
3	Sering	3	2	3.70
4	Selalu	4	49	90.74
Total			54	100,00

Gambar 8
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran



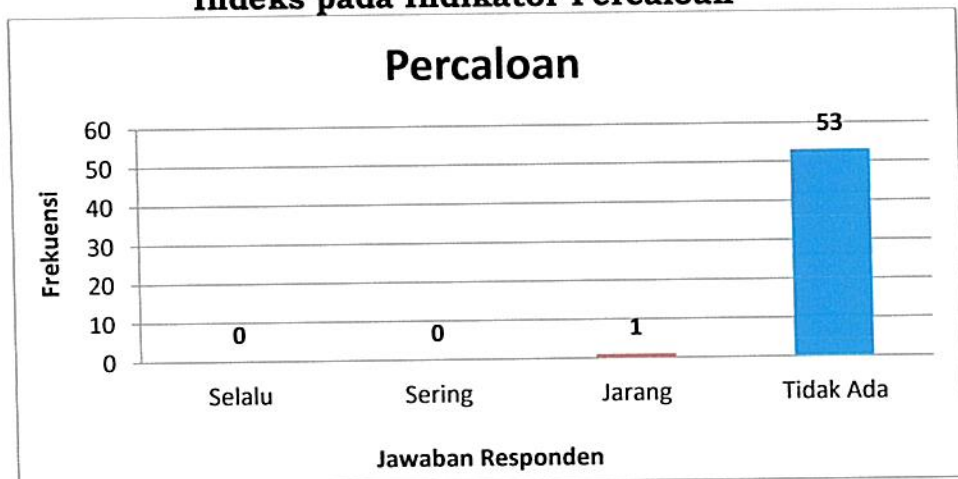
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 – 4 hasil persepsi responden pada Indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada Indeks **3,981**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari Percaloan.

Tabel 16
Indeks pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Selalu	1	0	0.00
2	Sering	2	0	0.00
3	Jarang	3	1	1.85
4	Tidak Ada	4	53	98.15
Total			54	100,00

Gambar 9
Indeks pada Indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 - 4 hasil persepsi responden pada Indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada Indeks **3,907**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 17
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Selalu	1	1	1.85
2	Sering	2	0	0.00
3	Jarang	3	2	3.70
4	Tidak Ada	4	51	94.44
Total			54	100,00

Gambar 10
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang



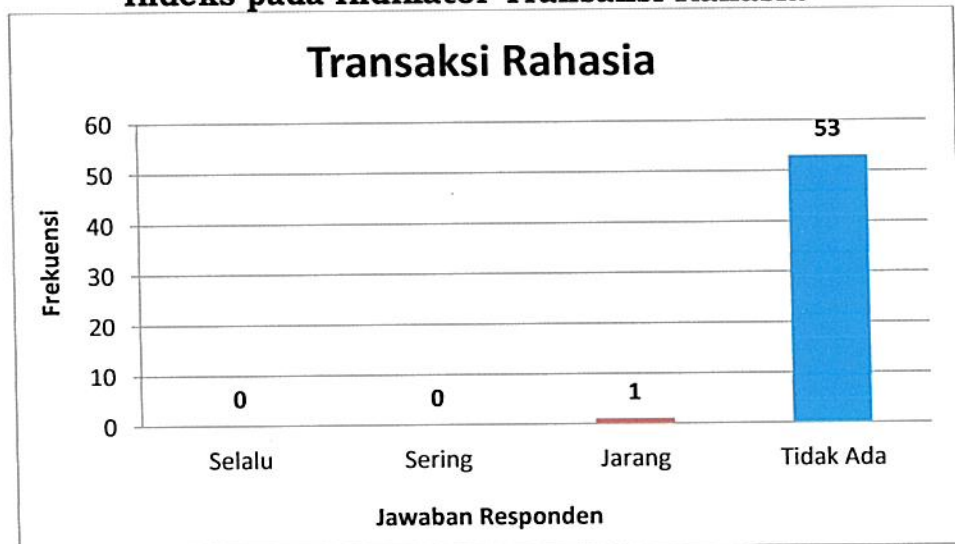
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 – 4 hasil persepsi responden pada Indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada Indeks **3,981**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari transaksi biaya.

Tabel 18
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	% (Persen)
1	Selalu	1	0	0.00
2	Sering	2	0	0.00
3	Jarang	3	1	1.85
4	Tidak Ada	4	53	98.15
Total			54	100,00

Gambar 11
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia



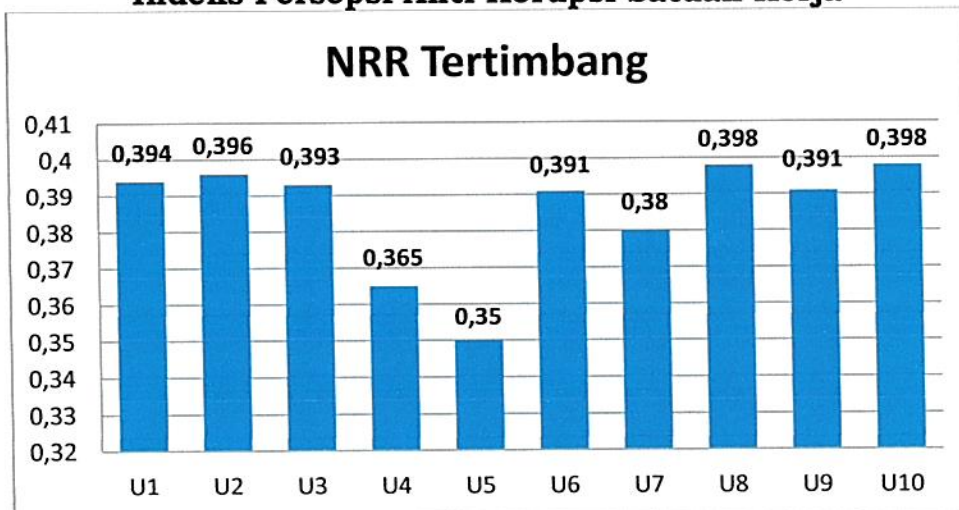
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak

Dari Indeks 10 Indikator tersebut diatas, maka diperoleh Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak sebesar **3,86 / 96,39 %**.

Tabel 19
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja

No	Pertanyaan	NRR Tertimbang	% (Persen)
1	U1	0.394	10.22
2	U2	0.396	10.27
3	U3	0.393	10.19
4	U4	0.365	9.47
5	U5	0.35	9.08
6	U6	0.391	10.14
7	U7	0.38	9.85
8	U8	0.398	10.32
9	U9	0.391	10.14
10	U10	0.398	10.32
Jumlah		3.856	100.00

Gambar 12
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja



Tabel 20
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari Korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, Survey yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Fakfak.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Masukan dan Pandangan Responden

No.	Kesan dan Pesan Responden
1.	Pelayanan sudah sangat baik;
2.	Petugas-petugasnya melakukan pelayanan dengan baik;
3.	Saya sangat terharu dengan pelayanan bapak/ ibu di Pengadilan negeri, sangat saya hargai kami/ saya sebagai masyarakat menilai bahwa pelayanan bapa/ibu ek kami sangat kami setuju , kami tidak pernah merasa takut;
4.	Pelayanan kepada masyarakat lebih dipermudah;
5.	Bebas biaya dalam setiap pengurusan;
6.	Saya sarankan agar setiap orang yang lagi bermasalah agar diperhatikan tentang kemampuan mereka untuk membayarkan kasus yang mereka ajukan, dikarenakan setiap orang / masyarakat tidak semuanya mempunyai kemampuan untuuk membayar perkaranya baik itu kasus perdata maupun pidana, mengenai perbaiki kn kedepannya apabila ada UUD yan terbaru apalagi menyangkut keselamatan oran banyak perlu adanya UUD Bbaru tersebut biar masyarakat dapat belajar dari jauh-jauh hari mungkin dibuatkan pertemuan ataupun sosialisasikan kesekolah-sekolah;
7.	Alhamdulillah Pengadilan Negeri Fakfak jauh dari namanya praktek KKN;
8.	Bersih dari KKN PN Fakfak terjamin;
9.	Sampai saat ini saya belum pernah melihat praktek KKN di Pengadilan Negeri Fakfak;

10.	Tidak ada tindakan pungli maupun korupsi;
11.	Informasi mengenai biaya perkara maupun administrasi lainnya mohon disampaikan pada saat dilayani. kalo bisa ada semacam papan informasi didepan petugas pelayanan sehingga kami tahu biayanya;
12.	Sejauh ini saya tidak mendapatkan pengalaman yang mengandung unsur gratifikasi di Pengadilan Negeri Fakfak;
13.	Bebas dari korupsi;
14.	Untku teknis ditingkatkan pelayanannya dan semoga mendapatkan WBK.
15.	Tingkatkan pelayanan yang lebih baik agar masyarakat lebih puas tanpa memandang latar belakang masyarakat itu sendiri .
16.	Pengadilan Negeri Fakfak bersih dari praktek KKN. Lanjutkan!;
17.	Bersih dari praktek pungli;
18.	Tidak ada sama sekali praktek korupsi;
19.	Dalam Pengurusan apapun tidak dipungut biaya;
20.	Tidak ada masukan dan saran karena Pengadilan Negeri Fakfak sudah melayani kami dengan baik.
21.	Ditingkatkan saja pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama.
22.	Untuk pribadi saya Pengadilan Negeri Fakfak sudah memberikan pelayanan yang baik
23.	Sudah baik

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II Bulan Juli - September Tahun 2023 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Fakfak memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,86 / 96,39 %** atau masuk pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing – masing memiliki indeks sebagai berikut :

Tabel 22
Rata-Rata Skor Ruang Lingkup Indeks Persepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.944	Sangat Baik	4
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.963	Sangat Baik	3
3	Menjual Pengaruh	3.926	Sangat Baik	5
4	Transparansi Biaya	3.648	Sangat Baik	9
5	Biaya Tambahan	3.5	Sangat Baik	10
6	Hadiah	3.907	Sangat Baik	6
7	Transparansi Pembayaran	3.796	Sangat Baik	8
8	Percaloan	3.981	Sangat Baik	1
9	Perbuatan Curang	3.907	Sangat Baik	7
10	Transaksi Rahasia	3.981	Sangat Baik	2

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Periode Juli s/d September Tahun 2023 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas **3,86 / 96,39 %** atau masuk pada persepsi **“BERSIH DARI KORUPSI”**.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jalan Yos Sudarso No. 92 ☎ : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

TINDAK LANJUT INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH

Dari hasil analisis Survey diperoleh rata-rata skor tiga unsur terendah yaitu Transparansi Biaya dengan skor **3,705**; transparansi Pembayaran dengan skor **3,795** dan Perbuatan Curang dengan skor **3,932**. Unsur terendah tersebut berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

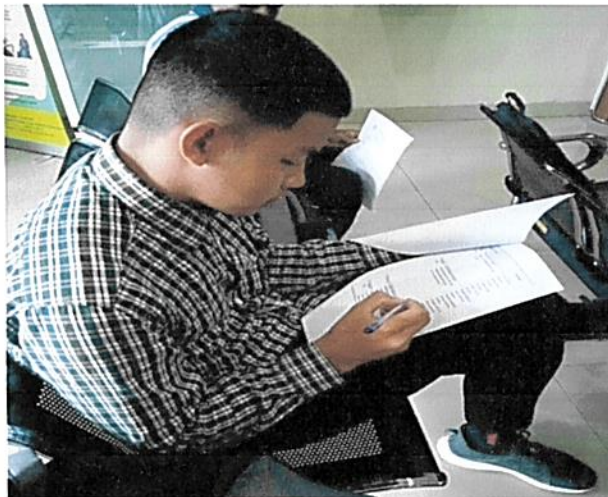
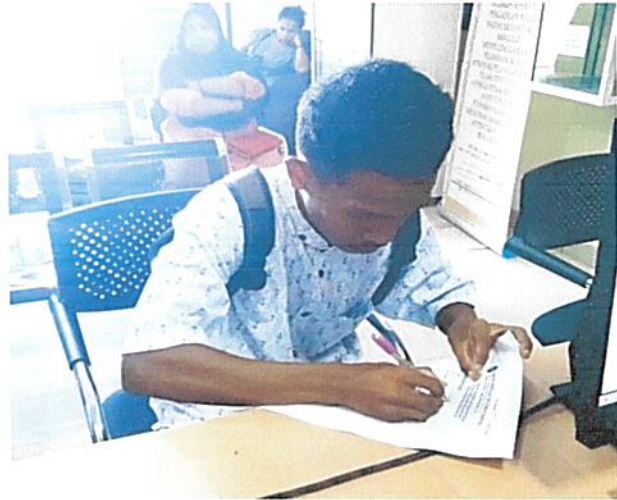
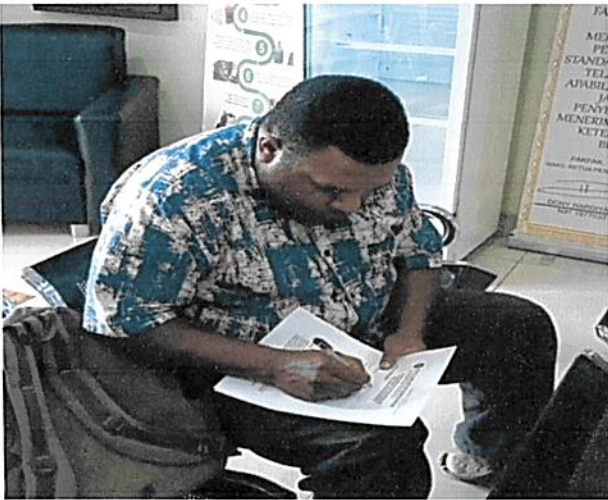
Top Management menindaklanjuti hal tersebut dengan cara melakukan langkah – langkah perbaikan : 1) Unsur Transparansi Pembayaran dan Transparansi Biaya untuk dibuatkan papan informasi biaya yang mana berisi biaya/tarif permohonan, surat keterangan dan surat lainnya yang dikenakan tarif administrasi, serta diletakkan diluar gedung (halaman pengadilan) agar lebih efektif , karena tidak semua masyarakat masuk kedalam untuk membaca informasi. 2) Untuk unsur Biaya Tambahan, selama ini petugas pelayanan di meja ptsp yang mengeluarkan surat keterangan atau pun jenis surat lain tidak ada meminta biaya tambahan, semua pembayaran sudah mengikuti prosedur juga disertai dengan bukti pembayaran.

Demikian tindak lanjut kami atas indeks persepsi anti korupsi yang berada pada tiga (3) unsur terendah.

Top Management,

Dony Hardiyanto, S.H., M. Hum
NIP. 19770331 200212 1 004

DOKUMENTASI



APLIKASI SISUPER

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK LOGIN

Beranda Statistik Kontak Kami

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI Beranda SPAK Detil

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 **Data Responden** Nama serta detil responden

2 **Layanan** Layanan

3 **Form Kuesioner** isian form kuesioner SPAK

4 **Kesan & pesan** mohon isi kesan dan pesan A...

Data Responden SPAK

Nama boleh inisial atau tidak diisi

Umur / Jenis Kelamin *

Nomor HP *

Domisili *

Pendidikan *

Pekerjaan *

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK LOG

Beranda Statistik Kontak Kami

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI Beranda SPAK Detil

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 **Data Responden** Nama serta detil responden

2 **Layanan** Layanan

3 **Form Kuesioner** isian form kuesioner SPAK

4 **Kesan & pesan** mohon isi kesan dan pesan A...

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? *

[Kembali](#) [Selanjutnya](#)



Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden Nama serta detil responden

Layanan Layanan

Form Kuesioner Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan Mohon isi kesan dan pesan A...

- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur
- Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu?
Petugas melayani selalu meminta imbalan
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan
- Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?
Selalu
Sering
Jarang

Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_spk

Google SPP MIS | MONITORING... SPP MA dbconfig PTSP Pengadilan Negeri... Firefox Bookmarks

Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan

- Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
- Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
- Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
- Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

Kembali **Selanjutnya**

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Beranda Statistik Kontak Kami

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI Beranda SPAK Detil

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden
 Nama serta detail responden

Layanan
 Layanan

Form Kuesioner
 Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan
 Mohon isi kesan dan pesan A...

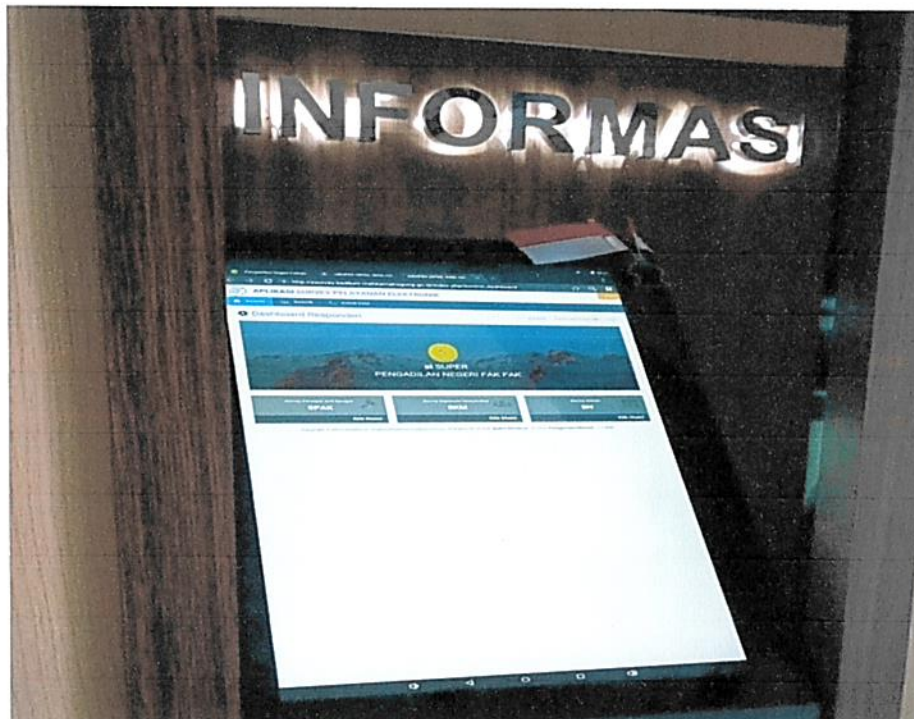
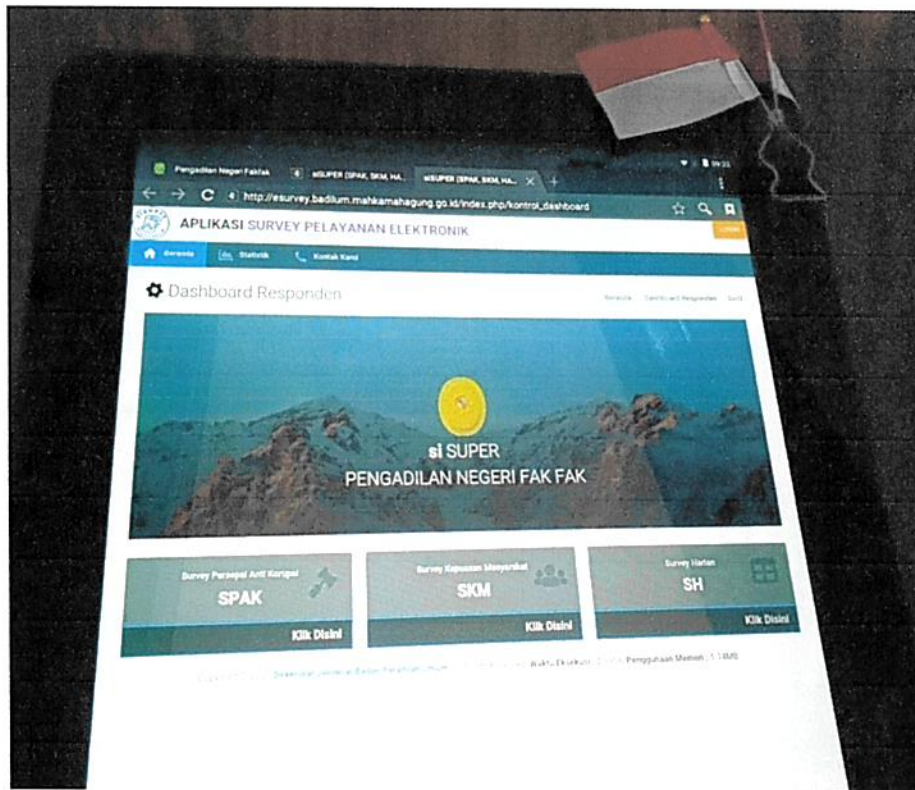
Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini.

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Fak Fak.
 Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot

Simpan Data

Sarana Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT
PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

Jalan. Yos Sudarso No. 92 Fakfak, Papua Barat 98613. Tlp/Fax (0956) 22413

Website: www.pn-fakfak.go.id ; Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

**TINDAK LANJUT
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH**

Dari hasil analisis survei diperoleh rata-rata skor tiga unsur terendah yaitu **Biaya Tambahan** dengan skor **3,500**; **Transparansi Biaya** dengan skor **3,648**; dan **Transparansi Pembayaran** dengan skor **3,796**. Unsur terendah tersebut berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”.

Top Management menindaklanjuti hal tersebut dengan cara melakukan langkah – langkah perbaikan : 1). Untuk unsur biaya tambahan, selama ini petugas pelayanan di meja ptsp yang mengeluarkan surat keterangan atau pun jenis surat lain tidak ada meminta biaya tambahan, semua pembayaran sudah mengikuti prosedur juga disertai dengan bukti pembayaran. 2.) Unsur Transparansi Pembayaran dan Transparansi Biaya, Top Manager menyampaikan langsung kepada petugas kasir maupun petugas di PTSP agar memberikan informasi tentang biaya perkara maupun biaya PNBPN yang dikenakan di Pengadilan Negeri Fakfak.

Demikian tindak lanjut kami atas indeks persepsi anti korupsi yang berada pada tiga (3) unsur terendah.

Top Management,

Dony Hardiyanto, S.H., M. Hum
NIP. 19770331 200212 1 004